Dampak Kerja Sama *Bilateral Currency Swap Arrangement* Terhadap Penggunaan Dolar dalam Perekonomian Indonesia dan Korea Selatan

Salma Wanda Alifia Harahap[1], Muhammad Yusra[2], Poppy Irawan[3]

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

E-mail: salmawandaharahap@gmail.com[1], muhammadyusra@soc.unand.ac.id[2], poppyirawan@soc.unand.ac.id[3]

Abstract

This research aims to further analyze Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) cooperation between Indonesia and South Korea. This cooperation have agreed to extend on March 6 2020 for the same period of 3 years and worth IDR 115 trillion. The BCSA cooperation is expected to enable currency exchange using local currency. This research aims to see the impact of BCSA collaboration on reduce the use of the United States dollar. The research methods is qualitative methodology where the data for the research is obtained from various reading sources such as scientific journals, news, and official government websites. This research analyzes BCSA cooperation in two relevant dedollarization policies conceptions from IMF Working Paper 2010. Fiscal consolidation explain to maintain the state budget deficit and Monetary Policy carried out by the central bank to achieve inflation stability affect both countries in achieving macroeconomic stability. This research discover the BCSA coorperation achieved a trade surplus during the cooperation and increases the stable foreign exchange reserves of both countries diversification. The increase in the use of local currencies also continues as the country's economy continues to improve. The increase in the use of this currency is also based on ongoing investment and exports.

Keywords: *BCSA, Indonesia, South Korea, Dedollarization*

PENDAHULUAN

Keadaan ekonomi politik dunia saat ini mulai berubah di mana banyak negara yang berusaha menjadi negara kuat atau hegemoni dalam dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dari bidang perdagangan dunia di mana negara-negara berusaha menjalin kerja sama tidak hanya dengan negara dalam kawasan namun juga negara di luar kawasan. *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan negara untuk mendukung ekonomi negaranya. BCSA adalah kerja sama yang

memungkinkan pertukaran mata uang antar dua negara untuk menghindari kontrol pertukaran. Hal ini terutama dilakukan untuk melindungi investasi jangka panjang dan risiko perubahan suku bunga di kedua pihak.

Setelah krisis pasca Perang Dunia II, peran dolar mulai menjadi dominan. Peran dominan dolar terus berlanjut hingga menjadi mata uang internasional yang paling banyak digunakan dalam beberapa dekade terakhir. Dolar diketahui digunakan hingga 40% transaksi perdagangan global dibandingkan mata uang lainnya (Georgiadis dan Mezo 2021). Besarnya penggunaan dolar dalam perdagangan dunia tidak lepas dari peran dominan dolar dalam sistem keuangan global. Sebelumya, penggunaan mata uang secara internasional beberapa mengalami perubahan yang pada masanya tahun 1870 sampai awal 1900-an dikenal dengan emas dan adanya krisis akibat Perang Duni I akhirnya terjadi keruntuhan pada masa ini. Selanjutnya, Amerika Serikat hadir untuk menggantikan peran emas sebagai mata uang cadangan dan berlanjut hingga dekade ini.

Terjadinya krisis Finansial Asia 1997 merupakan salah satu sebab negara-negara terutama di kawasan Asia untuk melakukan kerja sama yang lebih erat. Indonesia dan Korea Selatan yang merupakan bagian dari kawasan tersebut tentu terkena dampaknya. Kedua negara ini akhirnya diberi bantuan pinjaman oleh IMF dengan nominal yang cukup besar. Indonesia berjumlah 7,3 miliar SDR dan Korea Selatan berjumlah $21 miliar USD (International Monetary Fund 1997). Adanya pemberian pinjaman ini megakibatkan melonjak pesatnya dolar di masing-masing negara tersebut. Kedua negara ini juga sama-sama tergabung dalam ASEAN+3 di mana pada tahun 200 dibentuk kerja sama Chiang Mai Initiative (CMI) yang menjadi dsara peningkatan dan menstabilkan ekonomi kawasan. Kerjasam CMI ini juga didalamnya terdapat perjanjian pertukaran mata uang sesama negara ASEAN.

Indonesia dan Korea Selatan akhirnya melakukan kerja sama perjanjian pertukaran mata uang ini. Kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement

(BCSA) antara Indonesia dengan Korea Selatan pertama kali di-implementasi pada 6 Maret 2014 yang memiliki masa selama 3 tahun. Perjanjian kerja sama ini untuk mendorong perdagangan bilateral di beberapa komoditas ekspor utama Indonesia ke Korea Selatan yaitu seperti barang manufaktur batu bara, briket, ovoid dan padatan serupa, batu bara, bijih tembaga dan konsentrat, karet alam, kayu lapis, panel veener, bubur kertas, soda, dan beberapa barang manufaktur lainnya (Silalahi 2022). Perjanjian Bilateral Currency Swap Arrangement antara Indonesia dengan Korea Selatan akhirnya dilakukan dengan pertukaran ke mata uang rupiah sebesar Rp 115 triliun dan dalam mata uang won sebesar 10,7 triliun won.

Kerjasam BCSA yang dilakukan oleh kedua negara ini memiliki komitmen yang sama untuk melindungi kedua bank sentral yang terlibat dalam pertukaran tersebut dari kerugian akibat fluktuasi mata uang. Menurut Bank Indonesia, terdapat dua tujuan kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) yaitu mendorong perdagangan bilateral yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kedua negara dan melindungi penyelesaian transaksi perdagangan dalam mata uang lokal antara kedua negara. Kerja sama ini telah diperpanjang sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2017-2020 dan 2020-2023. Pada situasi pandemi pada tahun 2020 telah mengarahkan pemerintah disetiap negara untuk melakukan suatu langkah untuk mengamankan keuangan global atau dunia dengan lewat skema mata uang atau disebut juga dengan *currency swap*. Penandatanganan kerja sama BCSA yang dilakukan antara Bank Indonesia dan Bank of Korea pada tanggal 5 Maret 2020 telah diapresiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dan juga Menteri Perdagangan Korea Selatan. Berlaku efektif mulai dari tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023 yaitu senilai KRW10,7 triliun atau Rp115 triliun, dan kesepakatan ini bisa diperpanjang sesuain dengan kesepakatan yang telah disepakati (Asna, Puspa, dan Abdul 2021).

Kerja sama ini dilakukan sebagai bentuk kesungguhan pemerintah untuk tidak bergantung pada dolar kembali. Indonesia dan Korea Selatan secara bersama menjalankan kerja sama ini untuk menstabilkan nilai Rupiah dan Won sebagai mata uang negara. Kerja sama ini akhirnya memberi pengaruh tidak hanya secara internasional atau dalam perdagangan saja namun juga memiliki dampak baik pada domestiknya. Dampak yang dihasilkan antara lain tercapainya stabilitas makroekonomi dan menurunnya penggunaan dolar dalam negara. Kerja sama ini berhasil menghasilkan surplus perdagangan, banyaknya investasi yang berjalan hingga terjadinya penaikan cadangan devisa oleh kedua negara. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis dampak kerja sama BCSA terhadap penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat pada perekonomian Indonesia dan Korea Selatan tahun 2020-2023.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang dilakukan dengan mengkaji hasil yang terjadi menjadi lebih rinci dalam menjelaskan dampak kerja sama BCSA terhadap penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat pada perekonomian Indonesia dan Korea Selatan. Penelitian ini dibatasi oleh penulis pada rentang 2020-2023. Tahun 2020 merupakan tahun penandatanganan perpanjangan

kerja sama BCSA antara Indonesia dan Korea Selatan. Kemudian, tahun 2023 merupakan tahun kerja sama ini berakhir sesuai perjanjian BCSA yaitu 3 tahun setiap kerja sama diberlakukan. Penulis akan melihat apa dampak yang dihasilkan dari BCSA terhadapa penggunaan dolar dalam kedua negara. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Peneliti menggunakan sumber media *online* seperti dokumen langsung yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan *Bank of Korea* sebagai data primer dan memulai mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik penelitian berdasarkan informasi yang dipublikasikan sebelumya, seperti dari buku, jurnal, artikel, situs resmi, dan penelitian terdahulu. Kemudian, penulis mengumpulkan data menggunakan beberapa kata kunci, seperti Indonesia, Korea Selatan, dedolarisasi, *Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA)*, stabilitas moneter, perdagangan, investasi dan cadangan devisa.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini terdapat salah satu tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul *China's Bilateral Currency Swap Agreement: Strategic Move to Foster Political and Financial Hegemony*. Artikel ini diterbitkan tahun 2022 dan ditulis oleh Abdullahi Ahmed Mohammed. Pada artikel ini dijelaskan bahwa Selama dua dekade terakhir, pihak berwenang Tiongkok memulai proses ekstensif untuk meliberalisasi dan menginternasionalisasikan Renminbi khususnya di bawah pemerintahan Perdana Menteri Zhu Rongji sejak tahun 1993. Tinjauan pustaka ini membahas tentang bagaimana pihak berwenang Tiongkok berkomitmen untuk mencapai

konvertibilitas penuh terhadapa Yuan (Renminbi) pada akhir abad ini. Selain itu, tinjauan pustaka ini membahas tentang Tiongkok yang mencapai pertumbuhan pesat dalam perdagangan secara internasional dan terjadinya surplus transaksi. Menurut tulisan ini, terjadinya peningkatan pesat Tiongkok salah satunya dengan melakukan pertukaran mata uang dengan negara lain. Selanjutnya, tinjauan pustaka ini memberikan gambaran kepada penulis tentang besarnya pengaruh pertukaran mata uang dalam mencapai stabilitas mata uang. Selain itu, tulisan ini juga menjabarkan bahwa tercapainya internasionalisasi Yuan atau RMB akan membantu mengurangi risiko mata uang bagi eksportir dan importir sehingga penerimaan RMB sebagai mata uang penyelesaian perdagangan akan mendorong perdagangan dan investasi internasional, yang bermanfaat bagi Tiongkok dan mitra dagang globalnya. Rujukan ini memberikan pandangan baru kepada penulis bahwa pertukaran mata uang atau swap dapat berpengaruh besar pada domestik dan internasional sebuah negara seperti Indonesia dan Korea Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya Kebijakan Stabilitas Inflasi Terhadap Perekonomian melalui Kerja sama BCSA Indonesia dan Korea Selatan

Dalam usaha penurunan penggunaan dolar, diperlukan kebijakan yang menimbulkan kestabilan perekonomian negaranya. Menurut IMF, usaha untuk menurunkan penggunaan dolar atau dedolarisasi diawali dengan negara yang dapat mencapai stabilitas makroekonominya yang terdiri atas dua yaitu, konsolidasi fiskal dan kebijakan moneter (Kokenyne et al. 2010). Selama kerja sama yang dilakukan selama tiga tahun terdapat beberapa perubahan positif yang

terjadi di Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia dan Korea Selatan terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi negara agar tetap tumbuh dan berkesinambungan. Kerja sama BCSA ini akhirnya memaksa negara untuk terus berada di ekonomi yang stabil. Jika keadaan negara tidak stabil bahkan menurun dengan drastis maka mitra kerja sama akan melepas kerja sama. Pada hal ini, kedua negara terus berupaya untuk menjaga stabilitasnya agar kerja sama terus berjalan agar tetap mendapat keuntungan. Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan terus berupaya mengendalikan anggaran negara agar terus terkendali dalam batas aman.

Kerja sama antara Bank Indonesia dengan Bank of Korea sudah pasti dilakukan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu keuntungan Indonesia dan Korea Selatan melakukan kerja sama ini adalah dapat mencapai stabilitas ekonomi makro terutama dalam stabilitas inflasi. Adanya perjanjian BCSA yang tertulis dan dijelaskan secara langsung berapa mata uang yang dapat ditukarkan masing-masing negara ke bank sentral.

Pemerintah Indonesia melakukan beberapa usaha untuk mecapai stabilitas. Secara fiskal, diusahan untuk menurunkan defisit anggaran. Beberapa usaha tersebut seperti adanya kenaikan pajak yang diberlakukan. Kenaikan pajak dimulai secara bertahap yang awalnya 10% naik menjadi 11% (Mubarok 2022). Hal ini juga sudah ditetapkan oleh pemerintah di mana pajak merupakan salah satu sumber besar pendapatan negara. Pemerintah Indonesia pada tahun 2020

tentu saja mengalami kesulitan dalam menurunkan mengontrol anggaran perdagangan karena terjadinya pandemi Covid-19. Adanya pandemi Covid-19 tentu saja menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia. Adanya pandemi berakibat lonjaknya defisit anggaran Indonesia menjadi 6,14% yang sangat jauh dari direncanakan yaitu sebesar 3% (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2023). Defisit anggaran dibatasi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara sesuai dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2023). Di Indonesia, dalam menjaga stabilitas moneter adalah dengan menahan terjadinya inflasi. Secara moneter, Bank Indonesia mengeluarkan target inflasi yang dirundingkan bersama dengan Pemerintah yaitu Kementerian Keuangan. Dalam perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, terdapat juga kordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah yaitu Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan kemudian ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 tentu saja mengalami kesulitan dalam menurunkan mengontrol anggaran perdagangan karena terjadinya pandemi Covid-19. Adanya pandemi Covid-19 tentu saja menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia. Adanya pandemi berakibat lonjaknya defisit anggaran Indonesia menjadi 6,14% yang sangat jauh dari direncanakan yaitu sebesar 3%. pada akhir tahun 2020, Indonesia berhasil bahkan terjadi surplus perdagangan sebesar $21,74 miliar USD (Bank Indonesia 2021). Adanya pandemi

yang terjadi pada tahun 2020 mengakibatkan penurunan kurs atau depresiasi nilai tukar Rupiah yang pada awal tahun Rp. 13.662 menjadi Rp. 14.105 pada akhir tahun 2020 (satudata, n.d.).

Defisit anggaran Indonesia juga terus menurun menjadi 4,57% dan semakin mendekati rencana defisit anggaran Indonesia yaitu 3%. Pada tahun 2021, Indonesia kembali mengalami surplus sebesar $35,34 miliar USD lebih tinggi dari tahun 2020 (BPK RI 2022). Pada tahun 2021 juga tercatat Indonesia berhasil mempertahankan inflasi negara yang rendah dan stabil. Inflasi negara yang stabil merupakan syarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi inflasi yang terjadi tercatat sebesar 1,87%.

Pada tahun 2022, aktivitas arus perdagangan mengalami perkembangan yang baik dengan laju pertumbuhan yang sangat pesat. Defisit anggaran Indonesia juga terus menurun menjadi 2,35% sudah sangat menurun dan berada di bawah target yang sudah ditetapkan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023) 2023). Pada tahun 2022, Indonesia mengalami surplus perdagangan sebesar $54,53 miliar USD. Kurs Indonesia mengalami penurunan dengan jumlahnya sebesar Rp. 15.731 pada akhir tahun (satudata, n.d.). Suku bunga atau kurs turun disebabkan oleh adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan panasnya konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina belum terlihat akan berakhir. Hal ini tentunya menimbulkan dampak beberapa harga komoditas dunia meningkat seperti gandum, pupuk, migas dan lainnya.

Indonesia tecatat terkenal inflasi menjadi 5,51% karena perlambatan ekonomi secara global yang terjadi ("Laporan Ekonomi & Keuangan Perekonomian Indonesia 2022 Tumbuh Solid" 2023).

Pada tahun 2023, defisit anggaran Indonesia terus menurun menjadi 1,65% (Saptati 2024). Indonesia terus mengalami surplus perdagangan namun pada tahun 2023 surplus yang dihasilkan tidak sebesar pada tahun 2022 disebabkan adanya peningkatan risiko global. Surplus yang dihasilkan mencapai $36,93 miliar USD (Fiskal Kementerian Keuangan 2024). Kurs Indonesia juga masih mengalami penurunan mencapai Rp. 15.416. Inflasi sempat meningkat pada tahun 2022 akibat konsisi global yang tidak stabil dan perlambatan ekonomi, namun Indonesia memiliki tanggap yang cepat untuk menurunkan angka inflasi. Berdasarkan siaran pers, Indonesia berhasil menurunkan angka inflasi menjadi 2,61%.

Korea Selatan sebagai negara yang terus mengalami peningkatan juga berusaha tetap menjaga ekonomi negaranya agar tidak mengalami kerugian. Diketahui bahwa Korea Selatan banyak melakukan aktivitas perdagangan salah satunya dengan Indonesia. Usaha Korea Selatan dalam menjaga stabilitas ekonomi domestiknya salah satunya dengan melakukan kerja sama BCSA dengan Indonesia. Sama halnya dengan Indonesia, Korea Selatan secara fiskal juga berusaha untuk menurunkan defisit anggarannya agar mencapai stabilitas ekonominya

Usaha Korea Selatan untuk menurunkan defisit anggarannya adalah dengan menstransfer atau mengalihkan beberapa proyek publik ke sektor swasta dan akan memotong gaji pejabat senior pemerintahan. Dalam kebijakan monter, Bank of Korea bersama pemerintah melakukan kerja sama. Secara moneter, Bank of Korea mengeluarkan kebijakan yaitu berdasarkan Pasal 6, Klausul 1 dari Undang-Undang Bank Korea, Bank Korea menetapkan target inflasi setelah berkonsultasi dengan pemerintah ("Inflation Targeting" 2024). Target inflasi untuk tahun 2019 dan seterusnya telah ditetapkan sebesar 2%. Bank akan menerbitkan Laporan Kebijakan Moneternya dua kali setahun untuk menjelaskan bagaimana Bank melaksanakan kebijakan moneter.

Adanya pandemi pada tahun 2020 mengakibatkan melonjaknya anggaran hingga 3,7% melebihi batas defisit anggaran negara ("2020 Government Financial Statement" 2021). Perdagangan Korea Selatan tetap mengalami surplus sekitar $44,865 miliar USD walaupun mengalami kendala aktivitas perdagangan disebabkan pandemi Covid-19 ("수출입 연도별 실적" 2024). Pada tahun 2020, kurs atau suku bunga mata uang Won berada di 1.180 Won per $1 USD ("South Korean Won to U.S. Dollar Spot Exchange Rate" 2024).

Pada tahun 2021, Korea Selatan berhasil menurunkan defisit anggarannya yang sempat melambung tinggi menjadi 1,5%. Dalam aktivitas perdagangan juga mengalami surplus sebesar $29,307 miliar USD ("수출입 연도별 실적" 2024). Mata uang Won pun kembali menguat dilihat dari kurs menurun menjadi 1.144

won per $1 USD. Pada tahun 2021 tercatat Korea Selatan mendapat tekanan inflasi yang cukup kuat. Realisasi inflasi yang terjadi tercatat sebesar 2,5%.

Pada tahun 2022, defisit anggaran Korea Selatan kembali naik menjadi 3% akibat dampak dari ketidakstabilan geoploitik dan inflasi (Fiscal Management Bureau 2022). Korea Selatan mengalami defisit mencapai $47,785 miliar USD diakibatkan melonjaknya harga pasar. Pada tahun 2022 ini dikenal dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang menjadikan petumbuhan ekonomi melambat dan akhirnya terjadi inflasi secara global. Mata uang Won juga terkena dampak sehingga mengalami penurunan menjadi 1.291 Won per $1 USD ("South Korean Won to U.S. Dollar Spot Exchange Rate" 2024). Korea Selatan mengalami penaikan inflasi menjadi 5,1% yang termasuk inflasi yang cukup kuat.

Pada tahun 2023, perekonomian global masih terkena dampak dari ketidakstabilan geoploitik dan inflasi. Pada tahun ini, Korea Selatan mengalami penurunan defisit anggaran menjadi 1.8% (International Monetary Fund. Asia and Pacific Dept 2023). Aktivitas perdagangan masih terjadi defisit namun tidak sebanyak 2022, yaitu menjadi $10,346 miliar USD. Mata uang Won pun masih berada di kondisi turun yaitu 1.306 per $1 USD ("South Korean Won to U.S. Dollar Spot Exchange Rate" 2024). Perekonomian di Korea Selatan masih mengalami penurunan namun berhasil perlahan mencabai stabilitas. Korea Selatan berhasil menurunkan inflasi yang terjadi menjadi 3,6%. Berhasilnya menurunkan angka

inflasi yang cukup signifikan membuktikan pemerintah Korea Selatan memiliki usaha yang cukup kuat mempertahankan stabilitas ekonomi negaranya.

Konsolidasi fiskal yang baik membuktikan negaranya memiliki usaha untuk terus meningkatkan serta menstabilkan perekonomian domestik. Dilihat dari aktivitas perekonomiannya, perdagangan yang menjadi salah satu kerja sama utama terus berjalan. Walaupun banyak hal yang tak terduga terjadi seperti pandemi dan ketidakstabilan geoplitik di dunia internasional, perekonomian masih terus berjalan bahkan mencapai surplus atau keuntungan. Tercapainya keuntungan ini membuat kedua negara tidak perlu khawatir akan melakukan pinjaman terhadap bank sentral karena berhasil mencukupi kebutuhan ekonominya melalui surplus perdagangan.

Adanya kebijakan moneter yang stabil membuktikan bahwa kedua negara mampu secara domestik mempertahankan ekonomi negaranya. Berjalannya perekonomian secara baik akhirnya mendukung negara untuk melanjutkan kerja sama internasional untuk mendorong peningkatan ekonomi negaranya. Jika perekonomian domestiknya baik maka sangat memungkinkan dalam bekerja sama dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal.

Perdagangan dan Investasi

Adanya surplus perdagangan dikarenakan kerja sama yang dilakukan antar kedua negara yaitu Korea Selatan dan Indonesia yang ternyata tercatat tetap melakukan perdagangan walaupun mengalami beberapa kali situasi yang tidak

terduga seperti pandemi Covid-19 dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Adanya kerja sama BCSA juga menjadi faktor jalannya perdagangan terus berjalan dan tidak mengalami kerugian nilai tukar akibat penggunaan dolar. Pada data tahun 2020 tercatat kerja sama perdagangan sebesar $13,356 juta USD. Pada tahun 2021 kerja sama perdagangan naik menjadi $18.409 juta USD. Pada tahun 2022 tercatat kembali naik menjadi $24.526 juta USD. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak $20,827 juta USD (satudata 2024).

Kerja sama BCSA juga sangat membantu negara dalam menjaga defisit anggaran yang sudah ditentukan. Berhasilnya negara mempertahankan stabilitasnya dalam defisit anggaran membuat negara tidak menambah utang atau meminjam dalam jumlah besar pada dolar AS. Adanya penggunaan mata uang lokal melalui swap membantu negara untuk tidak mengeluarkan anggaran lebih dalam bertransaksi menggunakan dolar. Ketika perdagangan masih menggunakan dolar, maka transaksi dan perdagangan tidak stabil karena melihat kurs mata uang sesuai pergerakan dolar.

Kerja sama BCSA antara Indonesia dan Korea Selatan ini selain meningkatkan perdagangan, juga meningkatkan investasi. Indonesia merupakan tujuan investasi Indonesia. Indonesia sebagai penerima investasi dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Korea Selatan menjadi salah satu investor terbesar Indonesia pada tahun 2023 dengan total Foreign Direct Investment dengan besar nilai $2,5 miliar USD (“Bertemu CEO LG CNS, Menko Airlangga Dorong Investasi Korea Selatan pada Pembentukan Platform Teknologi Masa Depan” 2024). Pada tahun 2022, Korea Selatan berhasil melakukan 4.016

proyek dengan nilai investasinya mencapai $1,66 miliar USD ("Indonesia-Korsel Bahas Kerja Sama Ekonomi Digital" 2022). Indonesia dengan Korea Selatan banyak sekali melakukan kegiatan ekonomi terutama perdagangan. Pada perdagangan sendiri, kerja sama ekspor dan impor pasti menjadi tujuan utama negara untuk melakukan kerja sama. Kerja sama bilateral ini tentu memberikan untung bagi kedua negara karena memiliki kepentingan negara yang berbeda-beda.

Cadangan Devisa

Ketika terjadinya surplus atau peningkatan perdagangan, maka pendapatan negara terus meningkat. Meningkatnya pendapatan tidak menutup kemungkinan bagi cadangan devisa kedua negara dapat digantikan dengan mata uang lokal negaranya. Meningkatnya cadangan devisa juga menurunkan penggunaan dolar dalam negara**.** Indonesia mengalami peningkatan cadangan devisa pada Desember 2020 tetap tinggi yaitu sebesar $135,90 miliar USD. Jumlah ini meningkat dari tahun 2019 yaitu sebesar $129,18 miliar USD atau naik sebesar 5,20% (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2023). Cadangan devisa pada Desember 2021 juga meningkat menjadi $144,91 miliar USD (BPK RI 2022). Pada Desember 2022 terjadi penurunan menjadi $137,2 miliar USD. Pada tahun 2023 meningkat kembali sebesar $146,4 miliar USD (Total Reserves 2024).

Korea Selatan mengalami peningkatan cadangan devisa pada Desember 2020 yaitu sebesar $443 miliar USD. Cadangan devisa pada tahun 2021 meningkat sebesar $463,28 miliar USD. Tahun 2022 menurun menjadi $423,37

miliar USD. Pada Tahun 2023, cadangan devisa masih menurun menjadi $420,93 miliar USD (Total Reserves 2024).

Diketahui di cadangan devisa Indonesia pada tahun 2021 terjadi diversifikasi sehingga cadangan devisa tidak didominasi oleh dolar AS tetapi sudah berisi mata uang negara lain di mana diketahui jumlah uang kertas asing senilai $12,39 miliar USD dengan jumlah *Special Drawing Rights* (SDRs) sebesar US$7,79 miliar (Annur 2022). Cadangan devisa Korea Selatan juga meningkat yang diketahui pada tahun 2021 banyak mata uang asing yang masuk ke cadangan devisa. Korea Selatan terus memperluas cadangan devisanya yang akhirnya membawa mata uang negara lain bergabung pada cadangan devisanya. Diketahui pada tahun 2021 diversifikasi dalam cadangan devisa Korea Selatan akibat pemberian dari IMF sebesar *Special Drawing Rights* (SDRs) $11,69 miliar (Yeojin dan Sojung 2021).

Tantangan BCSA Menghadapi Amerika Serikat

Indonesia dan Korea Selatan sebagai negara yang memiliki kerja sama yang banyak dengan Amerika Serikat, sejauh ini tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan Korea Selatan tidak secara langsung diberikan oleh Amerika Serikat. Tantangan yang dihadapi adalah lebih menekankan keapda bagaimana kedua negara ini dapat tetap menjalankan perdagngan selama melakukan kerja sama BCSA. Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan kelemahan dalam upaya dedolarisasi adalah mata uang lokal akan sulit digunakan untuk membayar kapal yang digunakan untuk melakukan pengantaran di jalur perdagangan lintas negara. Hal

ini dikarenakan 90% kapal untuk melakukan aktivitas ekspor-impor menggunakan bendera asing di mana mereka lebih ingin dibayar dengan uang dolar AS dibanding dengan mata uang lokal (Diah 2023)**.**

Sejauh ini, tantangan atau sanksi tidak ada diberikan oleh Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan kedua negara tersebut masih tetap menggunakan dolar Amerika Serikat di perdagangan internasionalnya. Kerja sama BCSA ini dilakukan sebagai upaya negara untuk menekan angka penggunaan dolar dalam negara namun bukan secara langsung menghilangkan penggunaan dolar dalam ekonomi terutama perdagangan. Berdasarkan artikel Moody's dalam laporan yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2023 menyatakan bahwa dominansi US Dolar dalam perdagangan internasional akan terus berlangsung untuk beberapa waktu kedepan. Meskipun banyak tantangan-tantangan dan alternatif mata uang yang baru, US Dolar akan tetap dominan sebagai mata uang utama reserve dunia. Akan sulit untuk mengambil alih posisi USD sebagai mata uang utama karena belum bisa menggantikan kombinasi stabilitas dan keterbukaan ekonomi serta belum dapat menyaingi likuiditas dan keamanan *US treasury* sebagai instrumen *safe haven* dunia (Dewi 2023).

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini ditemukan hasil dan kesimpulan bahwa adanya perjanjian kerja sama BCSA memiliki dampak yang baik bagi kedua negara. Dampak kerja sama BCSA ini juga dipengaruhi oleh kebijakan yang berlaku. Adanya kebiakan yang diberlakukan adalah sebagai upaya negara dalam usaha

menstabilkan makroekonominya. Dengan menggunakan konsep dedolarisasi dengan kebijakan *Macroeconomic Stabilization* dari IMF, penulis menemukan bahwa negara akan mencapai kestabilan ekonominya dengan mengeluarkan kebijakan yang sesuai. Adanya kerja sama BCSA juga menjadi faktor jalannya perdagangan terus berjalan dan tidak mengalami kerugian nilai tukar akibat penggunaan dolar. Perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan terus berjalan bahkan terus mengalami penaikan yang stabil. Cadangan devisa kedua negara juga terlihat baik walaupun sempat mengalami penurunan. Peningkatan penggunaan mata uang lokal juga terus berjalan karena ekonomi negara terus membaik. Adanya peningkatan penggunaan mata uang ini juga didasari oleh investasi dan ekspor yang terus berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

"Inflation, consumer prices (annual %) - Korea, Rep.," World Bank, diakses Juli 7, 2024, https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=KR&start=2021

"수출입 연도별 실적," Korea Customs Service Import and Export Trade Statistics, diakses Juli 1, 2024, https://tradedata.go.kr/cts/index.do

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003," no. 1 (2003): 1–40.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Republik Indonesia Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 Laporan Hasil Pemeriksaan, 26b/LHP/XV., 2023.

Bank Indonesia, "Surplus Neraca Perdagangan Berlanjut," Terakhir diubah 2021, diakses Juli 1, 2024, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-

media/newsrelease/Pages/sp_231621.aspx.

BPK RI, "Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP 2021" (2022).

Fiskal Kementerian Keuangan, "Neraca Perdagangan Indonesia Sepanjang 2023 Tetap Surplus di Tengah Peningkatan Risiko Ekonomi Global," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Terakhir diubah 2024, diakses Juli 1, 2024, https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/554

Hubungan Masyarakat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, "Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 dan Proyeksi Tantangan 2024," Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Terakhir diubah 2024, diakses Juli 1, 2024, https://setkab.go.id/dinamika-pertumbuhan-ekonomi-indonesia2023-dan-proyeksi-tantangan-2024/

International Monetary Fund. Asia and Pacific Dept, Republic of Korea: 2023 Article IV ConsultationPress Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Republic of Korea, 2023.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023), "LKPP Tahun 2022," Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023): 425, https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporankeuangan-pemerintah-pusat.

Kim Yeojin dan Yoon Sojung, "FX reserves set another record high of USD 463.9B in Aug.," Korea.net, Terakhir diubah 2021, diakses Juli 13, 2024, https://www.korea.net/NewsFocus/Business/view?articleId=203368

Rani Saptati, "Kinerja APBN 2023 Luar Biasa, Capai Target Lebih Cepat dan Sehatkan Ekonomi Nasional," Media Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Terakhir diubah 2024, diakses Juli 1, 2024, https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kinerja-apbn-2023-luar-biasa-capaitarget-lebih-cepat-dan-sehatkan-ekonominasional.

Satudata, "Neraca Perdagangan Dengan Mitra Dagang," Kementerian Perdagangan, diakses Juli 1, 2024, https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/neraca-perdagangandengan-mitra-dagang

South Korea proposes first spending cut in 13 years," Al Jazeera, Terakhir diubah 2022, diakses Juli 8, 2024, https://www.aljazeera.com/economy/2022/8/30/south-korea-flags-first-spending-cut-in-13-years